

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2022-2023**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN/ FORMULASI	PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	SATUAN	KONDISI AWAL	TAHUN		Kondisi Akhir
											2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
	Terciptanya Kabupaten Sumedang yang kondusif dan demokratis	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	(Jumlah potensi konflik yang tertangani/ Jumlah Potensi Konflik) x 100%	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	1.Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006.	%	100	100	100	100

						<p>Perumusan Kebijakan Teknis dan pematapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p>	<p>Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama</p>	<p>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah. 5. Peraturan Bupati Sumedang No. 34 Tahun 2015.</p>					
--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--

						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2011;3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006;4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010;5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013;7.Peraturan Bupati Sumedang No. 34 Tahun 2015.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	1. Undang – undang nomor 17 Tahun 2013; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004; 3. Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999; 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015; 6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2016; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44; 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2017; 10. Peraturan Bupati Sumedang No. 34 Tahun 2015.					
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

